HUKUM PERDAGANGAN

OLEH

KARDILLA

Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas islam negeri
alauddin Makassar

Email: katokardilla@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang ingin dicapai dalam jurnal ini untuk menganalisis perdagangan berdasarkan Nilai moral Islam, dimana di pasar terdapat dua pelaku penjual serta yang membeli. Sumber yang paling utama dari jurnal ini yaitu studi literatur. Penulis Mengambil kesimpulan Ada banyak perihal dalam perdagangan yang tidak pas dengan syariat Islam. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan sistem serta kerjasama antara seluruh elemen bisnis, masyarakat serta pemerintah. Dalam menentukan nilai dalam Islam (menentukan) harga tidak di bolehkan, sebab penetapan harga dilakukan kepada kekuatan pasar, ialah permintaan daya serta pasokan daya. ini di sesuai dengan krateristik perdagangan Islam dimana pelaku pasar harus mempromosikan kesalehan, keadilan serta kebaikan, menjaga tanda-tanda Islam, menerapkan manajemen yang baik.

Kata kunci: Perdagangan, sistem perdagangan, ayat Perdagangan.

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang akhir-akhir belum lama ini kerap timbul dengan bermacam berbagai serta wujud perihal ini di sebabkan aplikasi spekulasi serta tipu muslihat jadi bagian integral dalam peradaban ekonomi manusia dikala ini, seakan jaman Jahiliyah muncul kembali dihadapan kita dalam wujud yang beda, serta lebih variatif, apalagi berani memakai simbol-simbol keagamaan. Mulai yang terkecil, pasar tradisional tempat transaksi perniagaan rakyat dicoba, nilai kejujuran susah diidentifikasi, hingga proses perniagaan besar, nilai-nilai kejujuran telah tidak kita bisa lagi sebab alibi jangka pendek yakni keuntungan (profit), sementara itu kenyataan menunjukan kalau eksistensi entitas bisnis yang kerap mengabaikan komitmen moral kejujuran dalam jangka panjang eksistensinya hendak terpuruk, sebaliknya entitas bisnis yang mengedepankan komitmen moral kejujuran dalam tiap transaksi yang di coba, eksistensinya kian ekspansif serta profitable. Rasulullah SAW menyuntikkan nilai-nilai baru dalam tatanan jahiliyah pada kala itu, ialah nilai-nilai etika moral perdagangan, dimana perdagangan itu wajib selalu senantiasa silih yakni, serta membagikan keuntungan kepada kedua melaksanakan transaksi, keyakinan (trust) timbul, apabila si orang dagang sanggup menampilkan kapasitas kejujurannya dalam aplikasi krisis ekonomi yang akhir-akhir belum lama ini praktik perniagaan. Islam memberikan kebebasan pasar, serta menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan gunanya

selaras dengan penawaran serta permintaan. malah itu kita amati Rasulullah s.a.w. kala lagi naiknya harga, di dimohon oleh orang banyak supaya memastikan harga, hingga maka jawab Rasulullah s.a.w.: "Allahlah yang memastikan harga, yang mencabut, yang meluaskan serta yang berikan rezeki. aku mengharap mau berjumpa Allah lagi tidak terdapat seseorang juga di antara kalian yang memohon aku biar berbuat zalim terhadap darah ataupun harta barang." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi serta Abu Ya'la). Hendak namun bila kondisi pasar itu tidak wajar, misalnya terdapat penumpukan oleh sedangkan orang dagang, serta terdapatnya game harga oleh para orang dagang, hingga waktu itu kepentingan universal wajib didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam suasana demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan warga serta demi melindungi dari perbuatan kesewenang-wenangan serta demi kurangi keserakahan mereka itu. Begitulah bagi ketetapan prinsip hukum. Kedatangan ekonomi Islam wajib sanggup mengisi kekosongan nilai-nilai etika moral dalam perdagangan ini, sebab telah jelas etika kita perdagangan diatur dalam Al-Quran, berikut ini penulis membahas sedikit ayat-ayat al quran yang mengendalikan perdagangan.

PEMBAHASAN

Hukum dagang yakni ilmu yang mengendalikan ikatan antara sesuatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain melaporkan kalau hukum dagang ialah serangkaian norma yang mencuat special dalam dunia usaha ataupun aktivitas industry.

Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Sebabnya seba hukum dagang berkaitan dengan aksi manusia dalam urusan dagang. Oleh sebab itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan.sesudah itu hukum dagang pula berkaitan dengan hak serta kewajiban antarpihak yang bersangkutan dalam mengurus dagang. Hukum perikatan mengendalikan perihal ini. Seperti itu sebabnya hukum dagang dikategorikan ke dalam hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan hukum yang secara khusus mengendalikan perikatan-perikatan dalam mengurus dagang.

Pertumbuhan hukum dagang di dunia sudah berlangsung pada tahun 1000 sampai dengan 1500 pada abad pertengahan di Eropa. saat itu sudah lahir kota-kota hukumdagangyakniilmuyangmengendalikanGenoa, Venesia, Marseille, Florence hi ngga Barcelona. Meski telah diberlakukan Hukum Romawi (Corpus Iuris Civilis), tapi berbagai masalah terkait perdagangan belum bisa diselesaikan. sebab itu dibuatlah Hukum Pedagang (Koopmansrecht). Saat itu hukum dagang masih

bersifat kedaerahan. Kodifikasi hukum dagang pertama dibentuk di Prancis dengan nama Ordonance de Commerce pada masa pemerintahan Raja Louis XIV pada 1673. Dalam hukum itu terdapat beberapahal berkaitan dengan dunia perdagangan, mulai dari pedagang, bank, badan usaha, surat berharga hingga pernyataan pailit.

Pada 1681 lahir kodifikasi hukum perdagangan kedua dengan nama Ordonance de la Marine. Dalam kodifikasi ini tercantum semua hal yang berkaitan sama perdagangan serta kelautan, misalnya tentang perdagangan di laut. Kedua hukum itu kemudian jadi acuan dari lahirnya Code de Commerce, hukum dagang baru yang di mulai berlaku pada 1807 di Prancis. Code de Commerce membahas tentang berbagai peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak abad pertengahan.

Code de Commerce kemudian menjadi cikal bakal hukum dagang di Belanda serta Indonesia. Sebagai negara bekas penjajahan Prancis, Belanda memberlakukan Wetboek van Koophandel yang diadaptasi dari Code de Commerce. Meski sudah di sebarakan sejak 1847, penerapan Wetboek van Koophandel baru berlangsung sejak 1 Mei 1848. Lalu Belanda menjajah Indonesia serta ikut memengaruhi pertumbuhan hukum dagang di Indonesia. Akhirnya lahir Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) yang di ambil dari Wetboek van Koophandel yang kemudian jadi salah satu sumber dari hukum dagang Indonesia.

Hukum pedagang di Indonesia tidak terjadi begitu saja, melainkan berdasar pada sumber. Terdapat beberapa jenis sumber yang jadi rujukan dari hukum dagang, yaitu hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, hukum tertulis yang belum dikodifikasikan serta hukum kebiasaan.

Pada hukum tertulis yang sudah ada dikodifikasikan, perihal yang menjadi acuan yaitu KUHD yang mempunyai 2 kitab serta 23 bab. Dalam KUHD dibahas tentang dagang umumnya sebanyak 10 bab serta hak-hak serta kewajiban sebanyak 13 bab. Selain KUHD, sumber lain ialah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau biasa juga dikenal dengan Burgerlijk Wetboek (BW). Salah satu bab dari BW membahas tentang perikatan.

Pada hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, ada 4 Undang-undang yang menjadi acuan. Keempat UU itu ialah Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Adapun pada hukum kebiasaan, hal yang menjadi sumber adalah Pasal 1339 KUH Perdata dan Pasal 1347 KUH Perdata.

A. Subjek Hukum Perdagangan

Pendukung hak serta kewajiban hukum yang dimiliki oleh para manusia sejak lahir hingga meninggal dunia serta juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Pendapat lain menjelaskan bahwa subjek hukum ialah setiap manusia yang mempunyai hak serta kewajiban hingga memiliki wewenang hukum (*rechtbevoegheid*).

Dalam hukum dagang, hal yang menjadi subjek hukum ialah badan usaha. Istilah lain dari badan usaha adalah perusahaan, baik perseorangan maupun yang telah memiliki badan hukum. Ada beberapa jenis badan usaha, yaitu:

1. Perusahaan Dagang/Usaha Dagang (PD/UD)
2. Firma (fa)
3. Commanditaire Vennotschap (CV)
4. Perseroan Terbatas
5. Koperasi
6. Perseroan
7. Perum
8. Holding Company/Grup/Concern.

B. Hukum perdagangan internasional

Hukum perdagangan internasional ialah di bidang hukum yang berkembang sangat cepat. Ruang lingkup di bidang hukum ini cukup luas. Ikatan-ikatan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang sederhana, yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga ikatan atau transaksi perdagangan yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan dari adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). hingga, penjualan dagang semakin cepat. Batas-batas negeri bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal apa dan siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan e-commerce. Ada berbagai motif ataupun alasan mengapa negeri ataupun subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi faktanya ialah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi sukses, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak buktinya dalam sejarah-sejarah perkembangan dunia. Besar dan jayanya negeri-negeri di dunia ini tidak terlepas dari keberhasilan serta kegiatan negeri-negeri tersebut dalam perdagangan internasional. Sebagai contoh, kejayaan Cina masa lampau tidak terlepas dari kebijakan dagang yang terkenal dengan nama 'Silk Route' atau jalan sutera.

Silk Route tidak lain ialah rute-rute perjalanan yang dijalani oleh saudagar-saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

KESIMPULAN

1. Hukum dagang ialah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Definisi lain menyatakan bahwa hukum dagang merupakan serangkaian norma yang timbul khusus dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan. Hukum dagang masuk kedalam kategori hukum perdata, tepatnya hukum perikatan. Disebabkan karena hukum dagang berkaitan sama tindakan manusia dalam urusan dagang. Maka dari itu hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan. Meski sudah dijalankan Hukum Romawi , namun berbagai hal masalah terkait dengan perdagangan yang belum diselesaikan. Maka dari itu dibentuklah Hukum Pedagang.
2. Subjek Hukum Perdagangan Pendukung hak serta kewajiban hukum yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sehingga meninggal dunia serta juga dimiliki oleh pribadi hukum yang secara sengaja diciptakan oleh hukum sebagai subjek hukum. Definisi lain menjelaskan bahwa subjek hukum adalah setiap manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hingga memiliki wewenang hukum .
3. Hukum perdagangan internasional ialah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Ikatan-ikatan dagang yang bersifat lintas batas dapat memuat banyak

jenisnya. hingga, penjualan-penjualan dagang makin berlangsung dengan tepat. Batas-batas negeri bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan banyaknya teknologi, pelaku dagang tidak perlu tahu atau mengenal apa serta siapakah rekana dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lainya. Yang terjadi sesungguhnya ialah bahwa perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung bagi negeri dalam menjadi sukses dan makmur, sejahtera serta kuat. Hal ini telah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia. Besar serta jayanya negeri-negeri di dunia tidak lepas dari keberhasilan serta kegiatan negeri-negeri tersebut di dalam perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. Ridwan (1985). Hukum Dagang dalam Tanya Jawab. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suwardi (2015). Hukum Dagang Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish.

ISBN 9786024011017.

Kansil (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 302.

Permata, Cahaya (2016). Buku Ajar Hukum Datang. Medan: UIN Sumatera Utara. hlm. 10–12.

Algra (1983). Kamus Istilah Hukum. Bandung: Bina Cipta. hlm. 453.

Bagner, Hans, “Dispute Settlement,” dalam: Julian D.M. Lew and Clive Stanbrook (eds.), International Trade: Law and Practice, London: Euromoney, 1983.